

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.
2. *E-government* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.
3. Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap *e-government* pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.
4. *E-government* memediasi pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.
5. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa implikasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu untuk membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah sehingga daerah mampu mencapai kemandirian pemerintahan dan semakin terdorong untuk mengungkapkan kinerja pemerintahan melalui publikasi. Selain itu, publikasi keuangan daerah perlu untuk diintensifkan dalam penerapan pemerintahan berbasis elektronik sehingga mampu meningkatkan efisiensi biaya, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu untuk mengalokasikan belanja modal yang ideal untuk mengembangkan daerahnya dengan pembangunan infrastruktur, serta sarana dan prasarana masyarakat. Belanja modal yang dialokasikan secara tepat dan efisien perlu dilakukan dengan adanya transparansi dan kehati-hatian.

C. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan penelitian pada penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan data realisasi APBD teraudit dan belum teraudit karena belum tersedianya data realisasi APBD teraudit untuk tahun anggaran 2022. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data realisasi APBD teraudit karena data tersebut telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sehingga data lebih akurat.
2. Terdapat banyak data yang tidak bisa ditemukan untuk variabel *e-government* sehingga banyak *missing value* yang terjadi pada olah data penelitian ini. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya, menggunakan data yang lebih lengkap untuk mengetahui pengaruh *e-government* terhadap kinerja keuangan daerah.
3. Terdapat sejumlah 2 data variabel kinerja keuangan daerah (Y) yang terlalu besar, yaitu data Kabupaten Jepara tahun 2022 sebesar 1,16 dan data Kota Tegal pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 1,05 sehingga perlu dihilangkan.
4. Koefisien determinasi pada penelitian ini untuk variabel *e-government* hanya sebesar 3,7% dan variabel kinerja keuangan daerah sebesar 17%. Artinya, masih terdapat faktor-faktor atau variabel lain yang memengaruhi *e-government* dan kinerja keuangan daerah. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan

menambah variabel lain seperti kapabilitas auditor internal, GDRP, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

